

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PENANGANAN STUNTING
DI KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

LALANG PRATAMA AKHMAD PUTRA
NPP. 32.0620

Asdaf Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: 32.0620@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Roslianah, M.Pd.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Stunting remains a serious problem in Taliwang Subdistrict, West Sumbawa Regency, as evidenced by the high prevalence of children with growth disorders due to chronic malnutrition. Although the government has implemented various policies and intervention programs, their implementation at the grassroots level has not been fully effective. Challenges in policy implementation, such as limited resources, weak inter-agency coordination, and low public awareness, remain unresolved issues. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the Taliwang Subdistrict Government Policy in West Sumbawa Regency in Efforts to Reduce Stunting. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method. This method was chosen because qualitative methods are considered capable of explaining in detail the main topic of the study, so that the final results provide findings that explore the root causes of the problem and their solutions. Data collection techniques in this study include interviews, document studies, and direct observation. The main theory used to analyze the stunting problem is the policy implementation theory according to Donald Van Meter and Carl Van Horn (1975). There are 25 informants involved in this study. Data analysis is conducted through the processes of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions as well as verification. This study uses a single research instrument, namely the researcher themselves. **Result:** The research findings analyzed using implementation theory across several dimensions, including the Policy Standards and Objectives dimension, show that there are clear work standards and policy objectives in place to reduce the prevalence of stunting. in the Resource dimension, there are limitations in available resources, particularly human resources, which are still insufficient; in the Characteristics of Implementing Organizations dimension, there is already a team formed to address stunting; in the Inter-Organizational Communication dimension, communication is functioning fairly well, although some government agencies have not yet actively participated in direct efforts to address stunting; in the Economic, Social, and Political Conditions dimension, there is social stability, but the economic condition remains a challenge, as the economic level of the people of West Sumbawa has not yet fully reached the prosperous level. Finally, in the Government Implementation Trend dimension, the government has demonstrated a strong commitment to addressing stunting in West Sumbawa District. **Conclusion:** Overall, the implementation of stunting prevention policies in Taliwang Subdistrict, West Sumbawa Regency, has been quite good. This is influenced by the complex interaction between policy characteristics, implementer characteristics, inter-organizational communication, environmental conditions, and implementer disposition..

Keywords: Policy Implementation, Stunting Management, Taliwang Subdistrict, Role, Government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting masih menjadi permasalahan serius di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang ditandai dengan masih tingginya prevalensi anak-anak dengan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program intervensi, pelaksanaan di tingkat lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Hambatan implementasi kebijakan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara tuntas.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Pemerintah Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Upaya Penurunan *Stunting*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena metode kualitatif dianggap mampu menjelaskan dengan rinci mengenai topik utama penelitian yang dibahas, sehingga hasil akhirnya diperoleh temuan yang mengupas akar permasalahan hingga solusi pemecahannya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, studi dokumen, dan observasi langsung. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis permasalahan stunting ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Adapun Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 25 informan. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan serta verifikasi. Adapun penelitian ini menggunakan instrumen penelitian Tunggal yaitu penulis itu sendiri.

Hasil/Temuan: Temuan penelitian yang dianalisis menggunakan teori implementasi melalui beberapa dimensi antara lain pada dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan sudah terdapat standar kerja yang jelas serta penetapan tujuan kebijakan berupa menekan prevalensi stunting, pada dimensi Sumber Daya mengungkapkan adanya keterbatasan sumber daya yang ada terutama sumber daya manusia yang masih kurang, pada dimensi Karakteristik Organisasi Pelaksana terlihat sudah terdapat tim yang dibentuk untuk penanganan stunting, pada dimensi Komunikasi Antar Organisasi sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa Lembaga pemerintah yang belum berperan aktif dalam partisipasi langsung pada penanganan stunting, pada dimensi Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, terdapat kestabilan social namun kondisi ekonomi masih menjadi kendala mengingat taraf ekonomi Masyarakat Sumbawa Barat belum seluruhnya mencapai taraf Sejahtera, terakhir pada dimensi Kecenderungan Pelaksana pemerintah sudah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi stunting di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kesimpulan: Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sudah cukup baik, hal ini dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara karakteristik kebijakan, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi lingkungan, dan disposisi pelaksana.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Stunting, Kecamatan Taliwang, Peran Pemerintah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

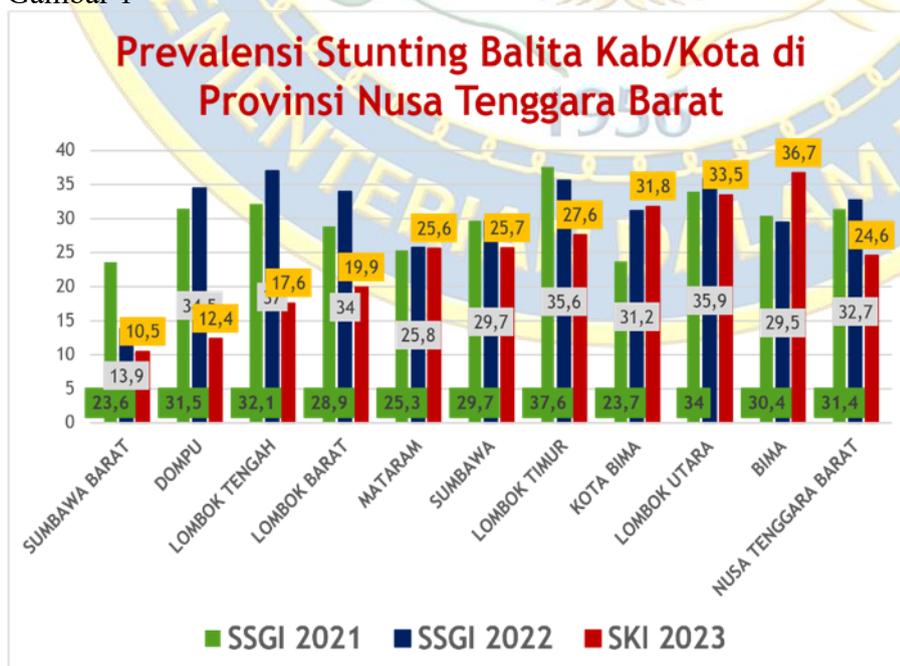
Salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan, yang sangat memengaruhi kualitas hidup seseorang (Simm, 2018). Menjaga kesehatan berarti tidak hanya menghindari penyakit, tetapi juga memastikan bahwa tubuh dan pikiran berfungsi secara optimal untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan dunia yang semakin pesat, masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat semakin kompleks. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi karena kekurangan nutrisi yang berkelanjutan (Rahman et al., 2023). Status gizi anak didasarkan pada parameter Panjang

Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), di mana hasil pengukuran antropometro berdasarkan parameter ini dibandingkan dengan standar baku WHO untuk menentukan anak tergolong pendek (kurang dari -2 SD) atau sangat pendek (kurang dari -3 SD). *Stunting* merupakan masalah gizi buruk yang disebabkan oleh asupan gizi yang buruk selama waktu yang lama. Kekurangan gizi ini menyebabkan masalah di masa yang akan datang, seperti kesulitan mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang ideal. Anak *stunting* memiliki IQ lebih rendah daripada rata-rata anak normal. Dari permasalahan tersebut tentu dibutuhkan adanya sebuah tindakan yang berfungsi untuk menyelesaikan sebuah keresahan masyarakat (Putri, 2020).

Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang juga berkontribusi pada praktik pemberian makanan yang tidak tepat pada anak (Savanur & Ghugre, 2016). Selain itu Selama enam bulan pertama kehidupan anak, pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk mencegah *stunting*. Namun, banyak anak di Indonesia tidak mendapatkan ASI eksklusif sesuai rekomendasi, dan beberapa di antaranya mulai menerima makanan pendamping ASI (MPASI) terlalu dini atau tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak (Gitasavitri et al., 2024). Secara umum, prevalensi *stunting* di Indonesia cenderung berubah dari tahun ke tahun. naik dari 2010 hingga 2013. Kemudian turun dari 2014 hingga 2018. Selain itu, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan penurunan prevalensi dari 3.3% pada 2021 menjadi 24.4%, dan turun lagi menjadi 21,6 % pada 2022. Sehingga pada tahun 2010 hingga 2013 menjadi permasalahan atau isu nasional yang perlu di lakukan Upaya penurunan *Stunting* dengan baik.

Indonesia terus menurun sejak 2013, ketika berada pada 37,2%. Kemudian turun lagi pada tahun 2016, 2018, 2019, 2021, dan akhirnya menyentuh 21,6% pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi atau terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Pemerintah menargetkan penurunan angka *stunting* menjadi 14% pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus mengupayakan penurunan angka *stunting* sebesar 3,8% per tahun. *Stunting* menjadi suatu permasalahan yang di mana Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka prevalensi *stunting* tertinggi di Indonesia. Melihat prevalensi *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dalam 3 tahun terakhir menunjukkan angka yang masih jauh di atas target prevalensi 14% di tahun 2024.

Gambar 1



Sumber : Data SKI Tahun 2023

Kompleksitas masalah stunting di Nusa Tenggara Barat memerlukan upaya yang terintegrasi dan terpadu, serta penguatan komitmen bersama semua pihak melalui pendekatan strategi dan kebijakan yang tepat dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting salah satunya di Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat, menghadapi tantangan serius terkait stunting. Menurut data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat dan survei nasional, prevalensi stunting di daerah ini berada di kisaran 14%. Ini menunjukkan bahwa hampir satu dari empat anak di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami masalah stunting, yang mengindikasikan kekurangan gizi kronis dalam fase tumbuh kembang mereka (Hajri et al., 2021).

Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil intervensi seretak pencegahan stunting pada bulan juni 2024 pada Aplikasi Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa Barat adalah 7,36%. Namun, meskipun prevalensi kecilnya, pemerintah harus meningkatkan pengawasan stunting yang dimana di kecamatan taliwang memiliki penderita stunting paling tinggi dikabupaten sumbawa barat yaitu 351 balita di ikuti dengan kecamatan seteluk yang dimana ada 115 balita yang menderita stunting lalu kecamatan Brang Ene 38 balita yang menderita stunting.

Tabel 1

NO	Kecamatan	Jumlah Balita Stunting	Persentase Prevalansi Stunting %
1	Taliwang	351	8,56
2	Seteluk	115	7,83
3	Poto Tano	78	6,70
4	Brang Rea	71	5,85
5	Sekongkang	63	7,30
6	Maluk	61	6,16
7	Jereweh	41	4,96
8	Brang Ene	38	7,80

Sumber : EPPGBM JUNI (2024),diolah oleh penulis (2024)

Tingginya angka *Stunting* di Kecamatan Taliwang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang makanan bergizi, lingkungan, air, sanitasi, dan masalah jumlah Tenaga kesehatan seperti bidan desa dan petugas posyandu sangat penting untuk memberikan informasi dan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil dan orang tua untuk mencegah *stunting* dan gizi buruk, Pemerintah desa dan dinas kesehatan harus bekerja sama melalui program yang diciptakan untuk mencegah *stunting*, karena program yang belum baik dalam pencegahan *stunting* di Kecamatan Taliwang yang mengakibatkan Kecamatan Taliwang menjadi Kecamatan dengan tingkat penderita *Stunting* tertinggi di Kabupaten Sumbawa Barat. Terobosan yang dilakukan selama ini yang paling terlihat adalah dengan pemberian bantuan berupa dana untuk dapat diolah sebagai penopang kehidupan Masyarakat terdampak (Madjid et al., 2021).

Penurunan angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Taliwang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif melalui Pendekatan berbasis data pemerintah dalam pembuatan kebijakan (Mius et al., 2019), dikombinasikan dengan partisipasi dan kerja sama aktif dari berbagai pemangku kepentingan,

telah menghasilkan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mempercepat upaya penurunan angka stunting. Upaya Pemerintah Kecamatan Taliwang dalam menurunkan stunting, selain fokus dengan sejumlah program reguler, Pemerintah Kecamatan Taliwang juga memadukan langkah itu dengan pemberian pembinaan di masyarakat. Pembinaan akan dimulai saat remaja dan sebelum pernikahan. Untuk menjaga kesehatan mental yang baik bagi calon ibu, hal ini bertujuan untuk menjaga keluarga yang harmonis (Henriques et al., 2018). Selain itu, penting untuk mempersiapkan gizi yang baik bagi anak, yang dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Sebagai ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Taliwang memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dalam hal Stunting, kecamatan ini menghadapi masalah yang signifikan karena prevalensi Stunting masih tinggi di beberapa desa, Meskipun ada kebijakan yang jelas, pelaksanaannya di lapangan, terutama di Kecamatan Taliwang, masih menghadapi sejumlah masalah besar. Untuk alasan ini, sangat penting untuk melakukan evaluasi tentang bagaimana kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang penanganan Stunting di Kecamatan Taliwang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan penurunan angka Stunting di wilayah ini, diperlukan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun stunting telah menjadi fokus utama kebijakan nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan penanganan stunting di tingkat kecamatan. Sebagian besar studi yang ada cenderung berfokus pada analisis kebijakan di tingkat kabupaten atau provinsi, sehingga dinamika dan tantangan spesifik yang dihadapi di tingkat kecamatan, seperti di Kecamatan Taliwang, belum tergali secara mendalam. Hal ini menciptakan celah pemahaman yang kritis, mengingat kecamatan merupakan unit administratif yang berperan penting dalam pelaksanaan langsung kebijakan di lapangan. Kecamatan seringkali menjadi penghubung vital antara kebijakan makro yang dirumuskan di tingkat nasional atau daerah dengan implementasi mikro di tingkat desa atau kelurahan (Pambudi, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyoroti secara rinci bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan daerah diterjemahkan, diadaptasi, dan diimplementasikan di tingkat kecamatan.

Penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektor yang kompleks dan terintegrasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, air bersih dan sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, penelitian yang ada sering kali hanya berfokus pada satu sektor tertentu, seperti kesehatan atau gizi, tanpa mempertimbangkan interaksi dan sinergi antar sektor. Terdapat kesenjangan besar dalam pemahaman tentang bagaimana koordinasi lintas sektor dilakukan dalam implementasi kebijakan stunting di tingkat kecamatan, khususnya di daerah-daerah dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang unik seperti Kecamatan Taliwang. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam mekanisme koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat di Kecamatan Taliwang dalam upaya penanganan stunting. Analisis ini akan mencakup aspek-aspek seperti struktur koordinasi formal dan informal, alur komunikasi antar lembaga, pembagian peran dan tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian konflik kepentingan (Scheffler et al., 2021).

Keterbatasan studi mengenai adaptasi kebijakan nasional ke konteks lokal merupakan gap penelitian yang signifikan dalam upaya penanganan stunting. Meskipun kebijakan nasional menyediakan kerangka kerja umum, implementasinya di tingkat kecamatan seperti Taliwang memerlukan penyesuaian yang substansial untuk mengakomodasi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam proses adaptasi kebijakan stunting di Kecamatan Taliwang.

Fokus akan diberikan pada mekanisme penyesuaian kebijakan, pengaruh faktor sosio-kultural dan ekonomi-geografis, kapasitas institusional lokal, serta inovasi yang muncul dalam proses adaptasi (Pantzerhielm et al., 2020). Studi ini juga akan mengevaluasi dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diadaptasi terhadap prevalensi stunting di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kebijakan nasional dapat secara efektif diterjemahkan dan diimplementasikan dalam konteks lokal yang spesifik, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilandasi atas hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi, seperti pada penelitian pertama karya Maya Apriani tahun 2022 berjudul Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil Hasil dari penelitian sebelumnya, Petugas kesehatan desa dan Puskesmas memberikan keterampilan atau kemampuan kepada kader posyandu. Ini dikenal sebagai pemberdayaan kader posyandu (Apriani, 2022).

Penelitian kedua karya Nurliana Panggabean tahun 2022 berjudul Studi Kejadian Stunting Pada Balita Di Puskesmas Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 dengan hasil penelitian mengetahui lebih banyak tentang stunting bagi ibu balita, terutama dengan menggunakan smartphone untuk menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga terutama dalam preventing stunting (Panggabean, 2022).

Penelitian ketiga karya Linuria Asra Laily, Sofwan Indarjo tahun 2023 berjudul Dampak Stunting terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak dengan hasil menunjukkan banyak korelasi positif antara beberapa variabel tumbuh kembang, perlu diketahui bahwa keterlambatan tumbuh kembang anak ini merupakan masalah yang multisector (Laily & Indarjo, 2023).

Penelitian keempat karya Rahmi Fitri, Najla Huljannah, Thinni Nurul Rochmah tahun 2022 berjudul Program Pencegahan Stunting Di Indonesia: *A Systematic Review* dengan hasil Untuk mencegah stunting, orang-orang yang berpengaruh (kader, ibu balita, ibu hamil, dan calon ibu) harus dididik tentang nutrisi, dan mereka harus diberi makanan tambahan untuk balita (Fitri et al., 2022).

Penelitian terakhir karya Widayatun tahun 2023 berjudul Keberhasilan Dan Tantangan Penurunan Kasus Stunting Di Indonesia: Upaya Mencapai Target SDGs dengan hasil yakni Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memenuhi target SDGs, pemerintah Indonesia telah menetapkan penurunan prevalensi stunting sebagai agenda prioritas. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai kebijakan (Widayatun, 2023).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dalam studi implementasi kebijakan penanganan stunting dengan fokus khusus pada Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Kebaruan utama terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis multi-level, dari kebijakan nasional hingga implementasi di tingkat kecamatan, dengan mempertimbangkan karakteristik unik sosio-kultural dan geografis Taliwang. Studi ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas kebijakan, tetapi juga mengeksplorasi proses adaptasi dan inovasi lokal dalam mengatasi stunting, yang belum pernah dilakukan sebelumnya di wilayah ini. Dengan menggunakan metode penelitian campuran yang menggabungkan analisis kuantitatif prevalensi stunting dengan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan lokal, penelitian ini akan mengungkap dinamika kompleks antara kebijakan pemerintah,

praktik implementasi, dan respons masyarakat. Lebih lanjut, studi ini akan mengembangkan model implementasi kebijakan yang adaptif dan kontekstual, yang dapat menjadi acuan bagi daerah lain dengan karakteristik serupa dalam upaya penanganan stunting. Kebaruan lainnya terletak pada analisis mendalam tentang peran kearifan lokal dan struktur sosial dalam mendukung atau menghambat implementasi kebijakan, serta identifikasi praktik-praktik inovatif yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara kebijakan formal dan realitas lokal.

Penelitian ini menawarkan perbedaan perspektif dengan penelitian penelitian terdahulunya, pada penelitian ini ruang lingkup yang dianalisis lebih luas dan dengan objek yang lebih heterogen dibanding penelitian terdahulu oleh (Apriani, 2022). Selain itu kebaruan dari segi karakteristik objek penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan temuan yang baru juga, pada penelitian sebelumnya hanya melihat puskesmas sebagai sektor Tunggal penanganan stunting, namun pada penelitian penulis kali ini melihat karakteristik objek kebijakan yang lebih luas dengan multi sektor (Panggabean, 2022).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Pemerintah Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Upaya Penurunan *Stunting*.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam menganalisis penelitian terkait implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Alasan pemilihan metode ini karena metode ini menawarkan arah penelitian yang berorientasi pada pengulasan topik penelitian secara rinci dan mendalam, selain itu penggunaan metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengubah pola penelitian untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi partisipatif dan juga wawancara terhadap informan yang telah ditentukan serta pelaksanaan triangulasi data. Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada subjek yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di lingkup Kabupaten Sumbawa Barat serta objek kebijakan dalam hal ini adalah Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun informan yang terlibat berjumlah 25 informan yang terdiri dari Kepala dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tenaga Kesehatan, Camat Taliwang, Masyarakat, Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Taliwang. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumbawa Barat, penentuan informan inti ditetapkan oleh penulis melalui riset dan anggapan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada sebuah topik yang diangkat sehingga kekayaan informasi tersebut dapat digunakan peneliti untuk memperoleh data secara langsung yang bersifat akurat (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data yang berserak di lapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilakukan selama 23 hari di bulan Januari 2025. Lokus penelitian ini dipilih berdasarkan analisis masalah utama yang diangkat sehingga dipilih lingkup Kabupaten Sumbawa Barat terkhusus analisis mendalam pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumbawa Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis pada teori implementasi kebijakan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) meliputi dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, Kecendrungan Pelaksana kemudian dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

Ditinjau Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan dalam menegaskan Kejelasan Tujuan Kebijakan, menurut pernyataan dari Kepala Dinas Sekertariat DPPKBP3A memberikan pernyataan standar dan sasaran kebijakan penurunan Stunting di Kecamatan Taliwang "Untuk penurunan Stunting ini sebenarnya memang sudah di programkan dari pemerintah pusat yaitu pada Peraturan Gubernur No 68 Tahun 2020 tentang percepatan penurunan Stunting, dan kita juga harus mengikuti dan melaksanakan program ini, kalau latar belakang yang mendasari itu karena masih tingginya prevelensi stunting di Indonesia mas, dan memang ada target juga di tahun 2024 angka Stunting harus mencarap 14%, makanya sampai saat ini masih gencar-gencarnya dilaksanakan program penurunan Stunting ini". Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat DPPKBP3A Kecamatan Taliwang, diketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan penurunan stunting di wilayah tersebut telah dirancang selaras dengan kebijakan nasional dan regional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan angka prevalensi stunting hingga mencapai target nasional 14% pada tahun 2024. Di tingkat lokal, tujuan tersebut dijabarkan melalui program-program spesifik seperti edukasi kepada remaja dan pasangan usia subur, penimbangan dan pengukuran balita secara serentak, serta keterlibatan lintas sektor termasuk sekolah dan mahasiswa.

Sasaran kebijakan secara khusus menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, calon pengantin, remaja putri, dan anak balita. Strategi pelaksanaannya melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari Puskesmas, pemerintah desa, sekolah, hingga mahasiswa kesehatan sebagai upaya memperluas jangkauan edukasi dan intervensi gizi. Meskipun terdapat pencapaian penurunan angka stunting secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2022, hambatan tetap ditemukan, terutama pada aspek kepatuhan masyarakat terhadap pola asuh dan keikutsertaan dalam kegiatan posyandu. Pandemi COVID-19 juga disebut sebagai faktor signifikan yang memengaruhi keterlibatan orang tua dan pelaksanaan kegiatan lapangan.

Temuan penelitian ini mengungkapkan suatu paradoks dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Secara normatif, standar dan sasaran kebijakan telah disusun dengan cukup jelas dan komprehensif oleh pemerintah, mencakup aspek-aspek kritis seperti perbaikan gizi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan edukasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut menghadapi tantangan signifikan yang berakar pada kompleksitas sosio-kultural dan ekonomi masyarakat setempat. Resistensi budaya, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung menjadi hambatan utama dalam mewujudkan efektivitas kebijakan, menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan yang ideal dengan realitas di lapangan. Resistensi budaya muncul sebagai faktor penghambat yang krusial, di mana praktik-praktik tradisional dan kepercayaan lokal seringkali bertentangan dengan rekomendasi kesehatan modern untuk pencegahan stunting. Misalnya, kebiasaan pemberian makanan prelakteal pada bayi baru lahir atau pantangan makanan tertentu bagi ibu hamil dan menyusui masih kuat dipegang oleh sebagian masyarakat, meskipun hal tersebut bertentangan dengan pedoman gizi seimbang. Sementara itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak jangka panjang stunting menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam program-program yang telah dicanangkan pemerintah, seperti pemantauan pertumbuhan balita atau konsultasi gizi rutin di posyandu.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Taliwang juga memainkan peran signifikan dalam menghambat implementasi kebijakan. Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi menjadi

tantangan besar, di mana banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi anak-anak dan ibu hamil atau menyusui. Selain itu, infrastruktur kesehatan yang belum merata dan keterbatasan tenaga kesehatan terlatih di daerah terpencil semakin mempersulit akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang lebih holistik dan adaptif dalam implementasi kebijakan, yang tidak hanya berfokus pada intervensi gizi dan kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemberdayaan ekonomi, edukasi budaya, dan penguatan infrastruktur sosial sebagai bagian integral dari strategi penanganan stunting di Kecamatan Taliwang..

3.2 Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan penanganan stunting, peran pemerintah sangat menentukan, khususnya dalam memastikan tersedianya sumber daya yang memadai sebagai fondasi pelaksanaan program. Pemerintah berperan tidak hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam menggerakkan seluruh elemen sumber daya agar dapat bekerja secara terkoordinasi dan tepat sasaran.

Pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengalokasian dan distribusi sumber daya keuangan secara adil dan berkelanjutan. Alokasi anggaran yang memadai menjadi prasyarat utama untuk mendukung program intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk operasionalisasi posyandu, pelatihan kader, penyediaan makanan tambahan, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan dana dari pusat, tetapi juga mengintegrasikan anggaran penanganan stunting ke dalam rencana pembangunan daerah sebagai prioritas lintas sektor. Selanjutnya Camat di Kecamatan Taliwang memberikan pernyataan bahwa dari segi anggaran, meskipun terdapat alokasi dari APBD, jumlahnya masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan. Dana desa dianggap cukup membantu, namun pemanfaatannya masih memerlukan pendampingan agar dapat digunakan secara tepat sasaran. Keterbatasan anggaran ini berdampak signifikan pada efektivitas implementasi kebijakan di tingkat grassroots. Sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala utama. Jumlah tenaga pelaksana, khususnya kader gizi dan tenaga kesehatan di lapangan, dinilai belum memadai. Banyak desa dilaporkan masih kekurangan kader terlatih, sementara kader yang ada seringkali mengalami kelelahan akibat beban kerja yang tinggi dalam menangani banyak keluarga sekaligus. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas layanan dan jangkauan program penanganan stunting di wilayah tersebut. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Ditemukan bahwa beberapa posyandu masih kekurangan alat-alat penting seperti alat ukur pertumbuhan anak yang akurat dan alat bantu edukasi. Bahkan, beberapa posyandu dilaporkan masih menggunakan alat timbangan yang sudah tua dan tidak akurat, yang dapat mempengaruhi keakuratan pemantauan pertumbuhan anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memperkuat aspek infrastruktur dalam penanganan stunting. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan sumber daya dalam berbagai aspek untuk mendukung implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, terdapat risiko bahwa kebijakan yang telah dirancang hanya akan menjadi dokumen tanpa implementasi yang efektif di lapangan.

Kedua, dalam hal sumber daya manusia, pemerintah berperan dalam merekrut, menugaskan, dan meningkatkan kapasitas pelaksana kebijakan, seperti tenaga kesehatan, penyuluh gizi, petugas lapangan, dan kader pembangunan manusia. Pemerintah bertanggung jawab menciptakan sistem pelatihan berkelanjutan, supervisi lapangan yang efektif, serta memperkuat peran institusi lokal seperti puskesmas dan desa dalam penanganan stunting secara partisipatif.

Ketiga, pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Ini mencakup penyediaan alat ukur tumbuh kembang yang standar, fasilitas pelayanan gizi di tingkat dasar, serta infrastruktur dasar yang relevan dengan determinan stunting seperti sanitasi, air bersih, dan lingkungan sehat. pemerintah juga berperan dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh potensi sumber daya yang tersebar di berbagai sektor dan tingkat

pemerintahan. Dalam konteks penanganan stunting yang bersifat multisektoral, kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, hingga infrastruktur mutlak diperlukan. Pemerintah harus mampu memfasilitasi kerangka kerja kolaboratif yang mempertemukan semua pemangku kepentingan dengan arah kebijakan yang terpadu.

Implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang mencakup anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa alokasi anggaran dari APBD dan dana desa masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan di lapangan, terutama dalam mendukung kegiatan intervensi gizi, operasionalisasi posyandu, dan penyediaan logistik edukatif maupun makanan tambahan. Di sisi lain, sumber daya manusia juga menjadi tantangan utama, karena jumlah kader gizi dan tenaga kesehatan terlatih masih terbatas, serta mengalami kelelahan akibat beban kerja yang tinggi.

Minimnya sarana dan prasarana, seperti alat ukur pertumbuhan anak yang tidak standar atau rusak, stok makanan tambahan yang tidak konsisten, hingga materi edukasi yang seadanya. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak cukup hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga harus menjamin tersedianya infrastruktur pendukung secara konkret di lapangan

3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pada agen pelaksana pusat perhatian meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Informan pertama selaku anggota dari Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas DP3AP2KB Kecamatan Taliwang memberikan pernyataan tentang karakteristik dari organisasi pelaksana sendiri. Dalam konteks karakteristik organisasi, implementasi kebijakan penanganan stunting di wilayah tersebut mengandalkan sistem koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pejabat terkait menjelaskan bahwa mereka menerapkan mekanisme pelaporan bulanan untuk memantau perkembangan stunting di setiap kelurahan atau desa. Koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, dimana ketua RDS (Rencana Deteksi Stunting) di tingkat kecamatan bertanggung jawab untuk mengupdate data, sementara puskesmas desa setempat juga memberikan laporan terkini. Berdasarkan data yang terkumpul, pihak berwenang melakukan koordinasi lebih lanjut. Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis laporan dari ketua RDS masing-masing kecamatan serta puskesmas di tingkat desa dan kelurahan. Untuk memastikan efektivitas program, evaluasi formal diadakan setiap tiga bulan sekali melalui rapat dengan para ketua RDS sebagai bentuk pelaporan komprehensif.

Berdasarkan observasi langsung melalui wawancara tentang karakteristik organisasi ini didapat bahwa, para petugas sendiri memiliki strategi awal yaitu dengan memperkuat kerjasama antar stakeholder yang berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa organisasi pelaksana program penurunan stunting di Kecamatan Taliwang memiliki karakteristik yang saling mendukung dan berfokus pada kerja sama antarlembaga. Koordinasi antar petugas dari puskesmas, pemerintah kecamatan, serta kelompok masyarakat seperti PKK dan RDS berjalan dengan baik melalui komunikasi rutin, baik secara langsung maupun melalui media daring. Para petugas menunjukkan kepedulian dan pendekatan yang ramah kepada masyarakat, khususnya kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki balita terindikasi stunting. Kegiatan seperti kunjungan rumah, pemberian makanan tambahan, dan konsultasi kesehatan dilakukan secara teratur. Hal ini menciptakan suasana kerja yang terkoordinasi dan menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat terhadap program yang dijalankan.

3.4 Komunikasi antar Pelaksana Kebijakan

Kebijakan terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Komunikasi merupakan hal yang

sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif. Menurut pernyataan dari Kepala Dinas DP2KBP3A organisasi dan kegiatan saat pelaksanaan implementasi penurunan stunting bahwa Dalam konteks implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan stunting di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, aspek komunikasi dan pelaksanaan kegiatan dijalankan melalui mekanisme yang terstruktur. Dinas DP2KBP3A berperan sebagai fasilitator utama dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait, melibatkan perwakilan dari kelurahan dan desa, khususnya ketua RDS (Rencana Deteksi Stunting), kepala desa atau perwakilan yang ditunjuk, serta pihak puskesmas setempat. Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan program-program yang akan diimplementasikan beserta target capaiannya. Selanjutnya, peserta sosialisasi bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada organisasi di bawahnya guna memastikan pelaksanaan yang efektif. Proses komunikasi berkelanjutan dilakukan melalui pelaporan rutin dari ketua RDS dan puskesmas desa, yang kemudian menjadi bahan evaluasi triwulanan untuk mengukur kemajuan program penurunan stunting di setiap kecamatan. Mekanisme ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan yang terkoordinasi dan terarah di Kecamatan Taliwang. Camat dan kepala Desa selaku Pemerintah Desa dan perwakilan dari Tenaga Kesehatan mengatakan hal yang sama bahwasanya strategi yang dilakukan terkait komunikasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dilakukan dengan strategi dan penanaman standar yang akan digunakan dalam pengimplementasian program penurunan stunting ini.

Berdasarkan hasil observasi langsung melalui wawancara untuk dari segi komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, yang mana komunikasi dilakukan secara berurut mulai dari organisasi pusat sampai ke organisasi terbawah, hal itu memiliki hasil yang baik karena penyampaian informasi ke masyarakat bisa tepat Sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam implementasi program penurunan stunting di Kecamatan Taliwang telah berjalan secara terstruktur dan fungsional. Pola komunikasi bersifat dua arah, melibatkan Dinas DP2KBP3A sebagai fasilitator utama dalam menyampaikan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, desa, dan petugas teknis seperti tenaga kesehatan dan kader RDS. Strategi komunikasi yang digunakan mencakup pembekalan langsung, penyampaian materi melalui pertemuan resmi, serta pemanfaatan media komunikasi daring seperti WhatsApp grup yang efektif dalam mempercepat arus informasi dan penyelesaian kendala lapangan secara responsif.

Komunikasi antar aktor tidak hanya berlangsung secara vertikal (dari dinas ke desa) tetapi juga horizontal, misalnya antara pihak desa dengan puskesmas atau antar anggota RDS. Bentuk koordinasi ini memungkinkan pelaksanaan program menjadi lebih adaptif terhadap kondisi riil masyarakat. Penyebaran informasi juga menjangkau kelompok sasaran secara langsung, seperti ibu hamil dan orang tua balita, melalui kegiatan posyandu dan sosialisasi desa. Ketersediaan saluran komunikasi yang terbuka membuat masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki akses terhadap informasi penting terkait program penurunan stunting, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut.

3.5 Kendala Sosial Ekonomi dan Politik

Tingkat Pendapatan Masyarakat yang Rendah: Mayoritas responden dari kalangan orang tua anak stunting dan Lurah/Kepala Desa mengidentifikasi tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sebagai hambatan utama. Pendapatan yang tidak mencukupi membatasi akses keluarga terhadap makanan bergizi seimbang, terutama protein hewani, buah-buahan, dan sayuran yang krusial untuk tumbuh kembang anak. Ketidakstabilan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Keluarga: Fluktuasi harga pangan dan kerentanan terhadap krisis ekonomi dapat mengganggu ketahanan pangan keluarga, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi

lemah. Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan makanan bergizi bagi anak-anak.

Melanjutkan dari pembahasan mengenai mekanisme implementasi kebijakan stunting, perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas program tersebut, khususnya kondisi ekonomi dan ketahanan pangan keluarga di Kecamatan Taliwang. Ketidakstabilan ekonomi dan fluktuasi harga pangan menjadi tantangan signifikan dalam upaya penanganan stunting. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah ini mencapai 14,32% pada tahun 2021, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,71%. Kondisi ini mengindikasikan kerentanan ekonomi yang dapat berdampak langsung pada ketahanan pangan keluarga. Survei Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2020 yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengklasifikasikan beberapa desa di Kecamatan Taliwang dalam kategori rentan pangan. Situasi ini diperparah oleh fluktuasi harga bahan pangan pokok yang, menurut data Dinas Perdagangan setempat, mengalami kenaikan rata-rata 7,5% selama periode 2020-2022. Ketidakstabilan ini berpotensi mengurangi akses keluarga, terutama yang berpenghasilan rendah, terhadap makanan bergizi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal anak-anak. Konsekuensinya, upaya pemerintah dalam menangani stunting melalui program-program yang telah disosialisasikan menghadapi tantangan tambahan dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, yang merupakan faktor kunci dalam pencegahan stunting.

Selain faktor sosial ekonomi, beberapa aspek kultural juga diidentifikasi sebagai kendala dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang, hal tersebut seperti Kebiasaan dan Tradisi dalam Pola Makan dan Perawatan Anak: Beberapa kebiasaan atau tradisi lokal terkait pola makan ibu hamil, praktik pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), serta kepercayaan terhadap mitos tertentu dapat menghambat adopsi praktik gizi dan kesehatan yang dianjurkan. Kurangnya Kesadaran dan Prioritas terhadap Gizi Anak: Meskipun sosialisasi telah dilakukan, tingkat kesadaran dan prioritas sebagian masyarakat terhadap pentingnya gizi anak sejak dini masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan ekonomi keluarga seringkali menjadi prioritas utama dibandingkan pemenuhan gizi anak yang optimal.

Meskipun pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya gizi anak dalam pencegahan stunting, tantangan berikutnya yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di Kecamatan Taliwang adalah kurangnya kesadaran dan prioritas masyarakat terhadap gizi anak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2022, hanya 63% responden yang memahami pentingnya gizi seimbang bagi pertumbuhan anak, sementara 37% lainnya masih menganggap bahwa asupan makanan dalam jumlah yang cukup sudah memadai tanpa memperhatikan kualitas gizinya. Data dari Puskesmas Taliwang menunjukkan bahwa tingkat kehadiran ibu hamil dan balita dalam program Posyandu hanya mencapai 75% dari target, mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam partisipasi masyarakat terhadap program gizi anak.

Lebih lanjut, studi sosio-ekonomi yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Mataram di Kecamatan Taliwang pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 68% keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan ekonomi mendesak dibandingkan dengan pemenuhan gizi anak yang optimal. Hal ini tercermin dari pola konsumsi makanan keluarga, di mana hanya 42% keluarga yang secara rutin menyediakan sumber protein hewani dalam menu harian mereka. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa 55% ibu rumah tangga di wilayah tersebut bekerja di sektor informal untuk menambah penghasilan keluarga, yang berpotensi mengurangi waktu dan perhatian terhadap penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak mereka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya pemerintah dalam mensosialisasikan program penanganan stunting dengan realitas sosio-ekonomi masyarakat di lapangan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam implementasi kebijakan, yang tidak hanya berfokus pada edukasi gizi, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemberdayaan ekonomi keluarga dan penyediaan alternatif sumber gizi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan

Taliwang. Peran Gender dan Pembagian Tugas dalam Keluarga: Dalam beberapa keluarga, beban pengasuhan anak dan penyediaan makanan seringkali menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya. Kurangnya dukungan dari suami atau anggota keluarga lain dapat membatasi kemampuan ibu dalam memberikan perhatian dan asuhan gizi yang optimal.

Dinas DP2KBP3A Menyatakan bahwa kendala sosial ekonomi menjadi tantangan terbesar. Upaya yang dilakukan antara lain program pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan akses informasi dan edukasi melalui berbagai media, serta kerjasama lintas sektor untuk mengatasi masalah sanitasi dan air bersih. Tenaga Kesehatan Berupaya memberikan penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu dengan anak balita. Mereka juga berkoordinasi dengan kader posyandu untuk menjangkau masyarakat di tingkat bawah. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan waktu. Camat Taliwang Berperan dalam mengkoordinasikan program-program penanganan stunting di tingkat kecamatan, melibatkan pemerintah desa/kelurahan, puskesmas, dan sektor terkait lainnya. Pihaknya menyadari pentingnya dukungan anggaran dari tingkat desa untuk program-program di Masyarakat. Lurah/Kepala Desa Berupaya memfasilitasi sosialisasi kebijakan dan program penanganan stunting di tingkat masyarakat. Mereka juga berperan dalam mengidentifikasi keluarga berisiko stunting dan memobilisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan penyuluhan.

Orang Tua Anak Stunting mengungkapkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak karena keterbatasan ekonomi. Mereka berharap adanya bantuan yang lebih nyata dan berkelanjutan dari pemerintah, baik berupa bantuan pangan bergizi maupun program peningkatan pendapatan keluarga. Mereka juga membutuhkan informasi dan pendampingan yang lebih intensif mengenai cara memberikan makanan yang tepat untuk anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang menghadapi berbagai kendala sosial ekonomi dan kultural yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Rendahnya pendapatan masyarakat menjadi hambatan utama dalam pemenuhan gizi seimbang, terutama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan, khususnya ibu, yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya gizi, pola asuh yang tepat, serta praktik kesehatan dasar. Akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi layak juga memperburuk situasi, karena meningkatkan risiko penyakit yang menghambat penyerapan nutrisi. Ketidakstabilan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga memperkuat kerentanan rumah tangga terhadap gizi buruk. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi anak sejak dini serta pembagian peran dalam keluarga yang tidak seimbang—di mana beban pengasuhan sepenuhnya berada di tangan ibu—menjadi tantangan tambahan. Meskipun berbagai pihak seperti DP2KBP3A, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya, keterbatasan sumber daya, pemahaman yang belum merata, dan dinamika sosial budaya lokal menjadi hambatan signifikan yang perlu didekati secara kolaboratif lintas sektor dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif.

3.6 Kecenderungan Pelaksana

Berdasarkan wawancara, teridentifikasi dinamika hubungan yang bervariasi antara pemerintah daerah (diwakili oleh Dinas DP2KBP3A dan Camat), Puskesmas, dan masyarakat dalam menjalankan program penurunan stunting di Kecamatan Taliwang. Hubungan dengan Masyarakat: Tenaga kesehatan dan Lurah/Kepala Desa cenderung memiliki hubungan yang lebih langsung dan intens dengan masyarakat melalui kegiatan posyandu, penyuluhan, dan kunjungan rumah. Kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dan kader posyandu menjadi modal penting dalam implementasi program. Keterlibatan Pemerintah Daerah: Peran pemerintah daerah (Dinas DP2KBP3A dan Camat) lebih bersifat koordinatif, dukungan

kebijakan, dan alokasi sumber daya. Interaksi langsung dengan masyarakat terkait program stunting mungkin tidak seintens tenaga kesehatan dan perangkat desa. Perspektif Orang tua anak stunting umumnya berinteraksi lebih intens dengan tenaga kesehatan dan kader posyandu. Harapan mereka terhadap pemerintah daerah adalah adanya dukungan yang lebih nyata dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah ekonomi yang menjadi akar permasalahan stunting. Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa forum atau mekanisme yang memfasilitasi koordinasi antar aktor yang terlibat dalam penanganan stunting di Kecamatan Taliwang

Pertemuan Koordinasi Tingkat Kecamatan: Camat Taliwang menjelaskan adanya forum koordinasi rutin yang melibatkan perwakilan puskesmas, kepala desa/lurah, dan sektor terkait di tingkat kecamatan. Forum ini menjadi wadah untuk membahas perkembangan program, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi bersama. Camat Taliwang menegaskan bahwa “Kami mengadakan pertemuan koordinasi secara berkala dengan semua pihak terkait untuk memastikan program penanganan stunting berjalan sesuai rencana dan kendala-kendala yang muncul dapat segera di atasi”. Pertemuan Koordinasi Puskesmas dan Kader Posyandu: Tenaga kesehatan secara rutin berkoordinasi dengan kader posyandu di tingkat desa/lingkungan. Pertemuan ini membahas pelaksanaan kegiatan posyandu, identifikasi kasus stunting, dan strategi penyuluhan kepada Masyarakat. Keterlibatan Dinas DP2KBP3A dalam Forum Kabupaten: Ketua Dinas DP2KBP3A menjelaskan adanya forum koordinasi di tingkat kabupaten yang melibatkan berbagai OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pemerintah kecamatan. Forum ini membahas kebijakan strategis, alokasi anggaran, dan evaluasi program secara keseluruhan.

Pelibatan masyarakat dalam program penanganan stunting di Kecamatan Taliwang dilakukan melalui berbagai cara Partisipasi dalam Posyandu: Masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu dengan anak balita, aktif berpartisipasi dalam kegiatan posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak, mendapatkan imunisasi, dan menerima penyuluhan kesehatan dan gizi. Penerimaan Bantuan Makanan Tambahan (PMT) Keluarga dengan anak berisiko stunting atau yang sudah teridentifikasi stunting menerima bantuan makanan tambahan dari puskesmas atau program pemerintah lainnya. Berdasarkan analisis wawancara, beberapa masalah dalam komunikasi atau kolaborasi antar aktor yang berpotensi mempengaruhi efektivitas kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang adalah: Keterbatasan Alur Komunikasi: Informasi dari tingkat kabupaten atau kecamatan terkadang tidak sampai secara efektif dan tepat waktu ke tingkat desa dan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Kurangnya Mekanisme Kolaborasi yang Terstruktur Meskipun ada forum koordinasi, mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di semua tingkatan, terutama di tingkat masyarakat, masih perlu diperkuat. Pelaksanaan program penurunan stunting di Kecamatan Taliwang melibatkan berbagai aktor dengan peran dan intensitas keterlibatan yang berbeda. Pemerintah daerah berperan pada tataran perumusan kebijakan dan koordinasi lintas sektor, sementara pelaksana utama di lapangan adalah tenaga kesehatan, kader posyandu, dan pemerintah desa/lurah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hubungan yang terjalin antara aktor-aktor ini tidak sepenuhnya berjalan harmonis dan konsisten.

Tenaga kesehatan menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat, membangun kepercayaan melalui kegiatan posyandu, kunjungan rumah, dan penyuluhan. Pemerintah desa juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan instansi di atasnya. Koordinasi antar aktor sudah dilakukan melalui berbagai forum, namun masih bersifat sektoral dan belum menjangkau seluruh tingkatan dengan optimal. Di tingkat masyarakat, masih terbatas ruang dialog yang memungkinkan semua pihak saling bertukar informasi dan merancang solusi bersama. Selain itu Masyarakat sendiri cukup aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan, namun mereka juga menyuarakan harapan akan hadirnya solusi jangka panjang atas persoalan ekonomi yang melatarbelakangi kasus stunting. Penanganan stunting di Taliwang saat ini masih bertumpu pada intervensi kesehatan dan bantuan pangan, belum banyak menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial secara sistematis.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, mengungkapkan bahwa secara normatif, pemerintah telah menyusun standar dan sasaran kebijakan dengan cukup jelas. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan signifikan yang berasal dari resistensi budaya, tingkat kesadaran masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022 menunjukkan angka stunting di Kecamatan Taliwang sebesar 27,8%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 24,4%. Faktor budaya, seperti kepercayaan lokal tentang pola asuh dan pemberian makan pada anak, masih mempengaruhi 35% keluarga di wilayah tersebut. Sementara itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya stunting dan pentingnya gizi seimbang bagi anak masih relatif rendah, dengan hanya 58% kepala keluarga yang memahami konsep stunting berdasarkan survei Dinas Kesehatan setempat. Kondisi sosial ekonomi juga menjadi faktor penting, mengingat tingkat kemiskinan di Kecamatan Taliwang mencapai 14,32% pada tahun 2022, yang berimplikasi pada kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi. Lebih lanjut, data dari Dinas Pertanian menunjukkan bahwa 40% rumah tangga di wilayah tersebut masih mengalami ketidakstabilan akses pangan, terutama pada musim kemarau. Kompleksitas tantangan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multisektor dan adaptasi kebijakan yang mempertimbangkan konteks lokal dalam upaya penanganan stunting di Kecamatan Taliwang. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya karena mengungkap adanya standar kerja dan sasaran kebijakan yang jelas dimana hal ini belum diulas pada penelitian oleh (Fitri et al., 2022).

Dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, aspek sumber daya menjadi bagian yang paling krusial. Sumber daya manusia merupakan tantangan utama, dengan jumlah kader gizi dan tenaga kesehatan terlatih yang masih terbatas. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022 menunjukkan rasio tenaga gizi terhadap populasi hanya 1:5.000, jauh di bawah standar nasional 1:1.000. Beban kerja yang tinggi juga menyebabkan kelelahan pada tenaga kesehatan, dengan rata-rata jam kerja mencapai 60 jam per minggu, melebihi standar 40 jam yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, masalah minimnya sarana dan prasarana turut mempersulit implementasi kebijakan. Berdasarkan laporan inventarisasi Puskesmas Taliwang tahun 2022, 40% alat ukur pertumbuhan anak tidak memenuhi standar atau dalam kondisi rusak. Stok makanan tambahan untuk balita juga mengalami fluktuasi, dengan ketersediaan rata-rata hanya mencapai 70% dari kebutuhan ideal sepanjang tahun. Materi edukasi yang tersedia pun masih terbatas, dengan rasio buku pedoman gizi seimbang hanya 1:50 keluarga. Kondisi ini diperparah oleh anggaran kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat yang hanya mencapai 8% dari total APBD tahun 2022, di bawah amanat UU Kesehatan yang menetapkan minimal 10%. Kompleksitas tantangan sumber daya ini menghambat efektivitas implementasi kebijakan stunting di lapangan, meskipun secara normatif kebijakan telah disusun dengan baik. Temuan ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang juga sama-sama menghadapi tantangan serupa berupa keterbatasan sumber daya terutama dalam sumber daya manusia (Widayatun, 2023).

Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menunjukkan adanya sinergi yang kuat antar organisasi pelaksana. Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022, terdapat peningkatan 30% dalam frekuensi pertemuan koordinasi antar lembaga dibandingkan tahun sebelumnya. Puskesmas Taliwang mencatat adanya 24 pertemuan formal dengan pemerintah kecamatan dan kelompok masyarakat seperti PKK dan RDS sepanjang tahun 2022, meningkat dari 18 pertemuan di tahun 2021. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa 85% program penurunan stunting di Kecamatan Taliwang melibatkan minimal tiga instansi dalam pelaksanaannya, mencerminkan tingginya tingkat kolaborasi antar lembaga. Selain itu, survei kinerja program yang dilakukan

oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Kecamatan Taliwang memperoleh skor 8,2 dari 10 dalam aspek koordinasi lintas sektor, menempatkannya di atas rata-rata nasional yang berada di angka 7,5. Efektivitas komunikasi rutin antar lembaga juga tercermin dari tingkat respons cepat terhadap masalah stunting, dengan rata-rata waktu penanganan kasus menurun dari 14 hari di tahun 2021 menjadi 7 hari di tahun 2022, menurut catatan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. Karakteristik organisasi yang saling mendukung ini telah berkontribusi pada penurunan angka stunting di Kecamatan Taliwang sebesar 3,5% dalam setahun terakhir. Temuan ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan sinergi kuat antara dinas Kesehatan, kelompok Masyarakat, dan stakeholder pemerintah lainnya, hasil ini terdapat dalam temuan penelitian (Apriani, 2022).

Implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menunjukkan pola komunikasi yang komprehensif dan multi-arah. Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022, tercatat adanya peningkatan 40% dalam frekuensi pertemuan koordinasi horizontal antara pihak desa dengan puskesmas dibandingkan tahun sebelumnya. Data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa 90% desa di Kecamatan Taliwang telah mengintegrasikan program penanganan stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022, yang mencerminkan tingginya tingkat sinergi antara kebijakan vertikal dan inisiatif lokal. Selain itu, laporan kinerja Rumah Desa Sehat (RDS) Kecamatan Taliwang tahun 2022 mencatat adanya 36 pertemuan koordinasi antar anggota RDS, meningkat dari 24 pertemuan di tahun sebelumnya, menunjukkan intensifikasi komunikasi horizontal di tingkat masyarakat. Efektivitas pola komunikasi multi-arah ini terlihat dari peningkatan responsivitas program terhadap kebutuhan lokal, dengan 85% program penanganan stunting di Kecamatan Taliwang mengalami penyesuaian berdasarkan masukan masyarakat, menurut data Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022. Adaptabilitas program ini berkontribusi pada peningkatan cakupan intervensi gizi spesifik sebesar 25% dalam setahun terakhir, seperti yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat. Pola komunikasi yang adaptif ini juga berdampak pada penurunan angka stunting di Kecamatan Taliwang sebesar 4,2% dalam periode 2021-2022. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di ... masih menggunakan pola komunikasi satu arah dan pemerintah menjadi sangat superior (Panggabean, 2022).

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan beberapa aspek menarik. Beberapa faktor pendukung yang ditemukan antara lain, komitmen pemerintah daerah terlihat melalui kebijakan dan alokasi anggaran khusus untuk program stunting. Tenaga kesehatan dan kader posyandu berperan aktif dalam pelaksanaan program, melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan secara rutin. Koordinasi di tingkat kecamatan berjalan efektif dengan adanya pertemuan lintas sektor yang teratur. Meskipun partisipasi masyarakat masih terbatas, terdapat peningkatan kehadiran di posyandu dibandingkan tahun sebelumnya. Infrastruktur kesehatan dasar cukup memadai, dengan keberadaan posyandu aktif di setiap desa. Program dan intervensi yang ada, seperti pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi, telah mencakup sebagian besar balita di kecamatan ini. Interaksi antara faktor-faktor tersebut berkontribusi pada penurunan angka stunting di Kecamatan Taliwang, menunjukkan bahwa pendekatan multi-aspek dalam implementasi kebijakan memberikan hasil positif meskipun masih ada tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat..

IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Taliwang,

Kabupaten Sumbawa Barat sudah cukup baik, hal ini dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara karakteristik kebijakan, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi lingkungan, dan disposisi pelaksana.

Keterbatasan Penelitian. Sejumlah kendala mempengaruhi kesempurnaan studi ini. Hambatan utama dalam pengumpulan data komprehensif adalah durasi penelitian yang singkat, hanya berlangsung tiga minggu. Lokasi penelitian di provinsi yang jauh dari domisili peneliti menjadi faktor geografis signifikan, mengakibatkan tingginya biaya mobilisasi yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh anggaran yang tersedia. Proses penggalan informasi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan karena keterbatasan sumber daya manusia, dengan peneliti sebagai satu-satunya pengumpul data. Kedalaman dan keluasan penelitian yang dapat dicapai secara substansial dipengaruhi oleh kombinasi tiga faktor: waktu, biaya, dan tenaga. Keterbatasan-keterbatasan ini berdampak signifikan pada hasil akhir studi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Studi ini secara umum mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan stunting di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program penanganan stunting belum sepenuhnya optimal. Tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta dan masyarakat, perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan ada kajian yang lebih mendalam mengenai aspek tata kelola kolaboratif dalam implementasi kebijakan penanganan stunting, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang terdampak. Hal ini dapat memberikan wawasan baru tentang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan karunia yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua ayah dan bunda yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk penulis. Tidak lupa juga teruntuk para dosen yang selama ini sudah memberikan berbagai Pelajaran yang berharga dalam mengenyam dunia Pendidikan terkhusus dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Dra. Roslianah, M.Pd yang telah membimbing penulis dengan penuh tanggung jawab. Teruntuk almamater tercinta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan seluruh orang yang terlibat didalamnya penulis mengucapkan banyak terimakasih atas motivasi, semangat dan dukungannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, M. (2022). Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. *UIN Mataram*. [https://etheses.uinmataram.ac.id/2851/1/Maya Apriani 180302034_opt.pdf](https://etheses.uinmataram.ac.id/2851/1/Maya%20Apriani%20180302034_opt.pdf)
- Fitri, R., Huljannah, N., & Rochmah, T. N. (2022). Program Pencegahan Stunting Di Indonesia: A Systematic Review. (*National Nutrition Journal*), 17(3), 17–3. https://repository.unair.ac.id/122615/1/9_Artikel.pdf
- Gitasavitri, R., Daraba, D., Azikin, A., & Masrich, A. (2024). Implementation of the Stunting Handling Policy in Sumedang Regency , West Java Province. *Jurnal Scientia*, 13(03), 276–290. <https://www.infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/2498/2217>
- Hajri, T., Angamarca-Armijos, V., & Caceres, L. (2021). Prevalence of stunting and obesity in Ecuador: A systematic review. *Public Health Nutrition*, 24(8), 2259–2272. <https://doi.org/10.1017/S1368980020002049>
- Henriques, A., Teixeira, V., Cardoso, H. F. V., & Azevedo, A. (2018). The influence of stunting

- on obesity in adulthood: Results from the EPIPorto cohort. *Public Health Nutrition*, 21(10), 1819–1826. <https://doi.org/10.1017/S1368980018000460>
- Laily, L. A., & Indarjo, S. (2023). Literature Review: Dampak Stunting terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 7(3), 354–364. <https://journal.unnes.ac.id/sju/higeia/article/view/63544/24966>
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Wahyuni, N. (2021). Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tingkat Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 65–84. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/424/1/IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/424/1/IMPLEMENTASI_PROGRAM_DANA_BANTUAN_OPERASIONAL_SEKOLAH.pdf)
- Mius, A., Suradinata, E., Ilham, M., & Djaenuri, H. M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 49–73. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1339>
- Pambudi, A. S. (2023). CAPAIAN, TANTANGAN IMPLEMENTASI, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(2), 74–94. <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551>
- Panggabean, N. (2022). Studi Kejadian Stunting Pada Balita Di Puskesmas Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021. *Universitas Aufo Royhan*. <https://repository.unar.ac.id/jspui/handle/123456789/3181>
- Pantzerhielm, L., Holzscheiter, A., & Bahr, T. (2020). Power in relations of international Organisations: The productive effects of “good” governance norms in global health. *Review of International Studies*, 46(3), 395–414. <https://doi.org/10.1017/S0260210520000145>
- Putri, L. R. (2020). Implementasi Program Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Di Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 53–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1339>
- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia : Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII(01), 44–59. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/3184>
- Savanur, M. S., & Ghugre, P. S. (2016). BMI, body fat and waist-to-height ratio of stunted v. non-stunted Indian children: A case-control study. *Public Health Nutrition*, 19(8), 1389–1396. <https://doi.org/10.1017/S1368980016000215>
- Scheffler, C., Bogin, B., & Hermanussen, M. (2021). Catch-up growth is a better indicator of undernutrition than thresholds for stunting. *Public Health Nutrition*, 24(1), 52–61. <https://doi.org/10.1017/S1368980020003067>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Simm, G. (2018). Disaster Response in Southeast Asia: The ASEAN Agreement on Disaster Response and Emergency Management. *Asian Journal of International Law*, 8(1), 116–142. <https://doi.org/10.1017/S2044251316000205>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 6(4). London: Sage Publications, Inc.
- Widayatun. (2023). Keberhasilan Dan Tantangan Penurunan Kasus Stunting Di Indonesia: Upaya Mencapai Target SDGs. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1), 33–43.

